



Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Bone, Provinsi Gorontalo

Parid Pakaya^{1*}, Sudarmanto Hasan², Suryadi Syamsudin³, Fitryane Lihawa⁴, Iswan Dunggio⁵

¹⁻⁵ Pascasarjana Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo 96128

Korespondensi penulis: faridpakaya21@gmail.com*

Abstract. Watershed management requires active community participation as a key actor in ensuring environmental sustainability. This study aims to analyze the forms, levels, and factors influencing community participation in the management of the Bone Bolango Watershed in Gorontalo Province. The method used is a descriptive qualitative approach supported by quantitative data from questionnaires distributed to 45 respondents. The results show that 75.6% of respondents are unaware of watershed programs, and only 24.4% have been involved in the planning stage. In the implementation stage, participation reaches 53.3%, mainly in reforestation and waste management activities. About 48.9% are aware of the evaluation process, but only 40% consider it transparent. Some community members (44.4%) perceive economic benefits, especially from planting productive trees. Educational activities are considered effective by 71.1% of respondents, although participation remains limited. The Bone Watershed Forum is viewed as strategic, yet community involvement needs to be strengthened. Enhancing local institutional capacity, transparency, and cross-sector collaboration is essential to improving sustainable community participation in watershed management.

Keywords: Community participation, watershed management, Bone Bolango.

Abstrak. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, tingkat, dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif dari kuesioner sebanyak 45 responden. Hasil menunjukkan bahwa 75,6% responden tidak mengetahui program DAS, dan hanya 24,4% yang pernah terlibat dalam tahap perencanaan. Dalam pelaksanaan, partisipasi mencapai 53,3%, terutama pada kegiatan reboisasi dan pengelolaan sampah. Sebanyak 48,9% mengetahui proses evaluasi, namun hanya 40% menilai proses tersebut transparan. Sebagian masyarakat (44,4%) merasakan manfaat ekonomi, terutama dari penanaman pohon produktif. Kegiatan edukasi dinilai efektif oleh 71,1% responden, namun partisipasi masih terbatas. Forum DAS Bone dinilai strategis, namun keterlibatan masyarakat perlu ditingkatkan. Diperlukan penguatan kelembagaan lokal, transparansi, dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS secara berkelanjutan.

Kata kunci: Partisipasi masyarakat, Pengelolaan DAS, Bone Bolango.

1. LATAR BELAKANG

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah daratan yang menampung dan menyalurkan air hujan ke sungai utama dan anak-anak sungainya, hingga akhirnya bermuara ke laut. DAS tidak hanya berfungsi sebagai sistem hidrologi alami, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis masyarakat di sekitarnya. DAS Bone Bolango adalah salah satu DAS utama di Provinsi Gorontalo yang memiliki peran strategis dalam penyediaan sumber daya air, mendukung kegiatan pertanian, menjaga keseimbangan ekosistem, dan mencegah terjadinya bencana lingkungan seperti banjir dan erosi.

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kondisi DAS Bone Bolango mengalami degradasi. Alih fungsi lahan dari hutan menjadi permukiman dan lahan pertanian, serta kegiatan pertambangan tanpa izin, telah menyebabkan rusaknya vegetasi penyangga dan mengganggu fungsi hidrologis DAS. Selain itu, praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat yang menggantungkan penghidupannya dari DAS tersebut.

Pengelolaan DAS tidak dapat hanya mengandalkan peran pemerintah semata. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa pendekatan top-down dalam pengelolaan sumber daya alam seringkali kurang efektif apabila tidak melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Masyarakat lokal adalah pihak yang paling dekat dengan sumber daya tersebut, sehingga mereka memiliki pengetahuan, kepentingan, dan peran yang besar dalam menjaga kelestarian DAS. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dalam pengelolaan DAS menjadi penting, di mana masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program konservasi dan rehabilitasi DAS.

Di Provinsi Gorontalo, berbagai program konservasi DAS telah dilakukan, baik oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Namun, keberhasilan program-program tersebut sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat lokal dilibatkan secara nyata dan diberi ruang untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks DAS Bone Bolango, masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tingkat partisipasi masyarakat, motivasi dan hambatan yang mereka hadapi, serta bentuk-bentuk kolaborasi yang telah terbentuk di lapangan. Penelitian mengenai partisipasi masyarakat ini menjadi relevan dan mendesak dilakukan, mengingat urgensi pelestarian DAS untuk keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS juga dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap sumber daya alam di sekitar mereka, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta mendorong terbentuknya kelembagaan lokal yang kuat dan adaptif. Melalui pemetaan terhadap bentuk-bentuk partisipasi—baik secara langsung seperti kegiatan penanaman pohon dan pemeliharaan sempadan sungai, maupun secara tidak langsung seperti penyuluhan dan pendidikan lingkungan—diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pengelolaan DAS yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Bone Bolango. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengungkap berbagai faktor yang mendukung dan menghambat

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis pada realitas sosial-ekologis lokal. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar bagi penguatan program konservasi berbasis masyarakat dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di Provinsi Gorontalo, khususnya di wilayah DAS Bone Bolango.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian dan Karakteristik Sampah

Istilah partisipasi sebenarnya diambil dari bahasa asing yaitu participation, yang artinya mengikut sertakan pihak lain. bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi sebagai feed-forward information and feedback information. Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut (Laily, E. I. A. N., & Imro'atin, E. 2015).

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai erat kaitannya dengan peraturan di bidang pemerintahan daerah, sumber daya air, perencanaan tata ruang, dan konservasi tanah dan air. Semua bentuk peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) harus diatur secara ketat sebagai dasar hukum untuk pengelolaan daerah aliran sungai di Indonesia.

Menurut Aprianty, H., *et all* (2018), Pengelolaan DAS secara terpadu sangat diperlukan dengan melibatkan pemangku kepentingan pengelolaan sumberdaya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah dengan prinsip-prinsip keterpaduan, kesetaraan, dan berkomitmen untuk menerapkan penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya alam yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif yang mengakomodasikan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) melalui pengaturan pengelolaan DAS secara tegas dan jelas.

Daerah Aliran Sungai (DAS) memiliki banyak istilah dan pemaknaan antara lain catchment area, watershed, atau drainage basin. DAS dalam bahasa Inggris disebut Watershed atau dalam skala luasan kecil disebut Catchment Area adalah suatu wilayah daratan yang

dibatasi oleh punggung bukit atau batasbatas pemisah topografi, yang berfungsi menerima, menyimpan dan mengalirkan curah hujan yang jatuh di atasnya ke alur-alur sungai dan terus mengalir ke anak sungai dan ke sungai utama, akhirnya bermuara ke danau/waduk atau ke laut. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu kesatuan ekosistem yang unsurunsur utamanya terdiri atas sumberdaya alam tanah, air, vegetasi, dan sumberdaya manusia sebagai pelaku pemanfaat sumberdaya alam tersebut (Ismah et all 2016).

Faktor pendorong partisipasi masyarakat

Kesempatan yaitu adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi. Kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi salah satunya ialah melalui peran pemerintah (Wastiti, A., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. 2021). Menurut Andriani (2017), Seringkali terjadi bahwa partisipasi masyarakat tidak nampak karena mereka merasa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi atau dibenarkan berpartisipasi. Karena itu, harus dijelaskan tentang segala hak dan kewajiban setiap warga masyarakat didalam proses pembangunan yang dilaksanakan, serta pada bagian kegiatan apa mereka diharapkan pertisipasinya yang diharapkan (tenaga, uang, materi, dll) dari masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode survei dan wawancara untuk memperoleh data mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Bone Bolango. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bentuk, tingkat, serta faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat berdasarkan pengalaman dan persepsi mereka.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah-wilayah yang termasuk dalam cakupan DAS Bone Bolango di Provinsi Gorontalo, khususnya desa atau kelurahan yang berbatasan langsung dengan badan sungai dan memiliki interaksi rutin dengan sumber daya di dalam DAS. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama April–Mei 2025.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat yang tinggal di sekitar DAS Bone Bolango dari hulu hingga hilir, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan DAS, seperti tokoh masyarakat, aparat desa, petugas lingkungan, dan anggota kelompok tani atau kelompok peduli lingkungan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu data yang bersifat sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh data pengumpulan data lembg terkait. Data primer diperoleh dari hasil wawancara di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak langsung dengan pemberian kuesioner, observasi dan dokumenter. Data survei (kuantitatif) dianalisis secara deskriptif menggunakan tabulasi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan pola partisipasi masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Partisipasi Pengelolaan DAS Bone

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi kunci keberhasilan program konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Berdasarkan data kuesioner terhadap 45 responden dan hasil wawancara dengan instansi pelaksana seperti pemerintah daerah, BPDAS, dan LSM lingkungan, diperoleh gambaran yang cukup komprehensif mengenai keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan DAS Bone.

Partisipasi dalam Perencanaan Pengelolaan DAS

Sebanyak 75,6% responden (34 orang) menyatakan tidak mengetahui adanya program pengelolaan DAS di wilayah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa informasi mengenai program DAS belum tersebar secara merata. Lebih lanjut, hanya 24,4% responden yang pernah diundang dalam diskusi perencanaan, dan dari jumlah tersebut hanya 20% yang aktif menyampaikan pendapat. Akan tetapi hampir separuh responden (48,9%) merasa bahwa pendapat masyarakat sudah didengar, meskipun 57,8% menilai bahwa proses perencanaan belum melibatkan masyarakat secara adil. Hal ini menunjukkan masih terbatasnya ruang partisipasi publik secara inklusif.

Menurut Sinery & Manusawai (2017), Keberhasilan suatu program pengelolaan lingkungan, khususnya dalam konteks DAS, sangat tergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proses perencanaan dan implementasi. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat rasa memiliki mereka terhadap sumber daya alam, sehingga mendorong keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya tersebut.

Partisipasi dalam Pelaksanaan Pengelolaan DAS

Sebanyak 53,3% masyarakat mengaku pernah ikut serta dalam kegiatan pengelolaan DAS. Menurut hasil wawancara, bentuk partisipasi tersebut mencakup musyawarah DAS, sosialisasi, penanaman dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), serta kegiatan pengelolaan sampah di bantaran sungai. Mengenai insentif, 46,7% responden menyatakan bahwa ada insentif berupa bibit gratis dan biaya pembuatan lubang tanam. Namun, 64,4% responden merasa bahwa insentif yang diberikan masih belum mencukupi, karena tidak mencakup biaya pemeliharaan dan pemupukan. Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara, di mana disebutkan bahwa masyarakat masih menghadapi kendala dalam kelanjutan pemeliharaan tanaman pasca penanaman.

Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi

Sekitar 48,9% masyarakat mengetahui adanya evaluasi program pengelolaan DAS. Sebagian besar dari mereka (60%) mengaku pernah dilibatkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi, khususnya pada program RHL dan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Evaluasi ini biasanya dilakukan oleh BPDAS dan melibatkan stakeholder terkait. Namun, hanya 40% responden yang menilai bahwa proses evaluasi dilakukan secara transparan. Meski demikian, wawancara dengan pihak pelaksana menyebutkan bahwa kegiatan evaluasi dilakukan melalui forum lintas sektor seperti SKPD dan Forum DAS, yang seharusnya menjadi ruang transparansi dan akuntabilitas publik.

Partisipasi dalam Aspek Ekonomi dan Kemitraan

Sebanyak 44,4% responden merasa bahwa program pengelolaan DAS berdampak pada peningkatan ekonomi. Program RHL yang menanam tanaman produktif seperti durian, rambutan, jambu kristal, dan alpukat dinilai mampu menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat jika dikelola dengan baik.

Selain itu, terdapat kemitraan antara masyarakat (kelompok tani hutan) dengan pemerintah, swasta, dan LSM seperti Burung Indonesia dan BMKG. Namun, 60% responden

menilai bahwa kemitraan ini belum berjalan maksimal dan perlu ditingkatkan dari segi kolaborasi dan koordinasi.

Partisipasi dalam Kebijakan Tata Kelola DAS

Dari sisi kebijakan, hanya 44,4% masyarakat yang mengetahui adanya kebijakan tata kelola DAS, dan 40% mengaku dilibatkan dalam penyusunannya. Hal ini mencerminkan rendahnya literasi kebijakan dan minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun, 62,2% masyarakat mengaku memiliki akses terhadap informasi kebijakan, dan 71,1% menyatakan adanya sosialisasi kebijakan terkait DAS. Ini menunjukkan adanya upaya penyebaran informasi, meski belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan partisipasi langsung.

Partisipasi dalam Konservasi dan Rehabilitasi DAS

Sebanyak 57,8% responden menyatakan pernah ikut serta dalam kegiatan konservasi DAS. Kegiatan ini meliputi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kebun Bibit Rakyat, dan penanaman pohon di hulu sungai. Namun, hanya 37,8% yang menilai kegiatan konservasi tersebut cukup efektif.

Wawancara menunjukkan bahwa masih banyak aktivitas pertanian dan perkebunan yang tidak mempertimbangkan konservasi DAS, terutama di daerah hulu. Ini menjadi tantangan besar dalam menjaga kelestarian sumber daya air dan hutan.

Masyarakat juga mendapatkan pelatihan konservasi melalui program RHL, meskipun belum merata di seluruh wilayah. Penelitian di Desa Meranti oleh Purwanti et al. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dinilai cukup baik, dengan skor 79,69%. Namun, indikator kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan program masih rendah, yang berarti ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam fungsi pengawasan dan evaluasi.

Partisipasi dalam Edukasi dan Sosialisasi

Tingkat partisipasi dalam kegiatan edukasi tentang pengelolaan DAS masih rendah, dengan hanya 24,4% responden yang pernah mengikuti kegiatan tersebut. Meski demikian, 71,1% menilai bahwa edukasi yang ada cukup efektif. Berdasarkan Wawancara adanya kegiatan edukasi lingkungan di sekolah dasar dan pemasangan rambu larangan membuang sampah di

sungai sebagai bagian dari upaya penyadaran publik. Namun demikian, belum semua kelompok masyarakat dilibatkan secara menyeluruh.

Keterlibatan dalam Forum DAS Bone

Sebanyak 57,8% responden mengetahui adanya Forum DAS Bone, namun hanya 44,4% yang pernah mengikuti kegiatannya. Meski demikian, mayoritas responden (68,9%) merasa forum ini memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan mendorong pengelolaan DAS yang lebih baik.

Hal ini menunjukkan bahwa forum ini berpotensi menjadi wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Bone sudah mulai terbangun, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan informasi, kurangnya insentif, rendahnya pelibatan dalam kebijakan, dan minimnya edukasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi, dan pemberdayaan masyarakat secara lebih sistematis dan inklusif.

Hasil Wawancara dengan Pemerintah dan LSM

Hasil wawancara dengan perwakilan pemerintah daerah dan LSM menunjukkan bahwa masyarakat memang telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan DAS, seperti musyawarah DAS, sosialisasi, penanaman pohon pada lahan kritis, pengelolaan sampah di bantaran sungai, serta pengawasan aktivitas pertanian dan pertambangan di hulu dan hilir sungai.

Pemerintah dan LSM juga menyediakan insentif dalam bentuk bibit pohon gratis dan biaya pembuatan lubang tanam dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Namun, beberapa pihak menyatakan bahwa insentif tersebut belum mencakup biaya pemupukan dan pemeliharaan, yang mengurangi daya dorong partisipasi masyarakat.

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui Program RHL dan KBR (Kebun Bibit Rakyat), di mana masyarakat kadang dilibatkan. Proses evaluasi dianggap cukup transparan, karena dilakukan pertemuan antar stakeholder sebelum dan sesudah program, termasuk melalui forum SKPD lintas sektor.

Dalam hal dampak ekonomi, program RHL yang menanam pohon produktif seperti durian, rambutan, dan jambu mente diharapkan dapat memberikan hasil ekonomi dalam jangka

panjang. Di sektor pertanian, kualitas dan pemerataan air juga berdampak positif pada produktivitas pertanian.

Masyarakat dilibatkan dalam kemitraan melalui kelompok tani hutan, Forum DAS, dan kolaborasi dengan pihak swasta, BPDAS, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, LSM Burung Indonesia, BMKG, dan instansi lainnya. Namun kolaborasi ini dinilai masih perlu ditingkatkan. Kegiatan konservasi yang telah dilakukan mencakup RHL, Kebun Bibit Rakyat dan Desa, serta penanaman di hulu sungai. Meski begitu, aktivitas pertanian dan perkebunan di hulu DAS dinilai masih kurang memperhatikan aspek konservasi.

Dukungan pemerintah dan LSM terhadap rehabilitasi DAS cukup terlihat melalui program-program yang ada, termasuk pelatihan konservasi dalam Program RHL. Kegiatan edukasi juga sudah dilakukan, misalnya di sekolah-sekolah dasar di wilayah Sub DAS Biyonga, namun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Beberapa kegiatan penyebarluasan informasi DAS juga telah dilakukan masyarakat, seperti pemasangan rambu larangan membuang sampah di bantaran sungai dan program penyelamatan daerah tangkapan air.

Pembahasan

Secara umum, hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS Bone masih terbatas pada aspek-aspek tertentu dan belum merata di seluruh tahapan pengelolaan. Kurangnya informasi, minimnya pelibatan dalam perencanaan dan evaluasi, serta keterbatasan insentif menjadi faktor utama rendahnya partisipasi. Namun, terdapat inisiatif baik dari pemerintah dan LSM yang sudah memulai pelibatan masyarakat, meski perlu diperkuat dalam hal transparansi, kesinambungan program, serta peningkatan insentif dan kapasitas masyarakat. Forum DAS Bone menjadi contoh forum kolaboratif yang cukup efektif, dan dapat diperluas fungsinya sebagai ruang strategis untuk meningkatkan koordinasi antar pihak. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan DAS sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas program, terutama dalam menghadapi tantangan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti DAS Bone, adalah krusial untuk mencapai keberlanjutan dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya air. Sebagai salah satu elemen sentral dalam pengelolaan lingkungan, partisipasi masyarakat bukan hanya meningkatkan pemahaman tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan Pambudi (2019).

Menurut penelitian yang dilakukan di berbagai daerah, masyarakat umumnya semakin memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pengelolaan sumber daya.

Misalnya, penelitian di kawasan hutan di Sumatera Barat menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya sangat diharapkan untuk menciptakan tindakan kolektif yang berkelanjutan (Tanjung et al., 2017). Peneliti juga mencatat bahwa keberadaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memfasilitasi kehadiran nilai-nilai lokal yang esensial untuk pengelolaan yang lebih efektif (Ismail et al., 2019).

Mengacu pada kajian yang dilakukan di daerah lain, temuan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata dan hutan tidak seragam (Salampessy et al., 2012). Variabel seperti karakteristik demografis, pendidikan, dan pengalaman memang berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka. Pengelolaan DAS Bone, misalnya, mungkin menghadapi tantangan serupa. Di mana peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan warga lokal akan memberikan dampak positif terhadap kelestarian kawasan tersebut (Narendra et al., 2021).

Dari perspektif kebijakan, penerapan pendekatan inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di DAS terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya (Sriyana, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, strategi yang lebih holistik dapat dirancang untuk mengatasi masalah kompleks yang terkait dengan pengelolaan air dan lingkungan. Dalam konteks DAS Bone, hal ini berarti mengoptimalkan fungsi setiap elemen dalam masyarakat, merangsang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta menciptakan kelompok kerja untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek pengelolaan sumber daya air.

Integrasi Partisipasi Masyarakat dengan Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJP Kabupaten Bone Bolango 2005–2025, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip dasar dalam pembangunan daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 RPJPD yang menyebutkan bahwa pembangunan harus menjamin partisipasi masyarakat dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, temuan penelitian terkait keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan DAS sejatinya telah sejalan dengan semangat kebijakan daerah. Namun, partisipasi tersebut belum optimal dan masih bersifat sektoral.

RPJPD juga menggarisbawahi perlunya sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Sayangnya, meskipun forum seperti Forum DAS Bone telah ada, responden menyatakan bahwa kolaborasi belum berjalan secara maksimal. Hal ini menjadi catatan penting bahwa implementasi kebijakan partisipatif perlu diperkuat dalam aspek operasional.

Kesesuaian Program Rehabilitasi dan Edukasi Lingkungan dengan Peraturan Tata Ruang

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Danau Perintis bertujuan untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan ekologi. Program-program seperti Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang dijalankan di wilayah DAS Bone dapat dilihat sebagai bentuk nyata dari penerapan prinsip pemanfaatan ruang berbasis konservasi.

Namun, kendala seperti keterbatasan insentif pemeliharaan dan kurangnya edukasi konservasi menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan belum selaras dengan amanat Perbup yang menekankan keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 4 dan 5). Perbup tersebut juga menyatakan perlunya *pengakuan terhadap kearifan lokal*, yang sayangnya belum banyak diangkat dalam hasil wawancara maupun observasi program DAS Bone.

Penguatan Kelembagaan dalam Konteks Tata Kelola DAS

RPJPD Kabupaten Bone Bolango menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang mencakup penguatan kelembagaan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Hal ini menguatkan perlunya evaluasi berkala dan forum lintas sektor seperti Forum DAS yang disebutkan dalam hasil wawancara. Namun, temuan bahwa hanya 40% responden merasa proses evaluasi dilakukan secara transparan menunjukkan masih lemahnya aspek akuntabilitas. Mengacu pada Perbup 42 Tahun 2019 Pasal 7, pengendalian pemanfaatan ruang harus menjadi dasar bagi pemberian izin, insentif, dan sanksi. Untuk itu, sistem monitoring yang inklusif dan partisipatif harus dikembangkan sebagai bagian dari reformasi kelembagaan pengelolaan DAS.

Peluang Integrasi Program DAS dengan Tujuan Pembangunan Jangka Panjang

Salah satu misi dalam RPJPD adalah menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan berbasis lingkungan. Program DAS seperti penanaman tanaman produktif memiliki potensi mendukung tujuan ini dengan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Perbup 42 Tahun 2019 yang menyebutkan fungsi pengendalian ruang sebagai kendali mutu untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kegiatan ekonomi. Namun, perbedaan persepsi masyarakat terhadap manfaat ekonomi dari program DAS menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum dirasakan merata. Oleh karena itu, program ekonomi produktif berbasis konservasi perlu lebih difokuskan pada kesinambungan dan pemanfaatan hasil, bukan hanya pada aspek penanaman awal.

Dalam pengembangan partisipasi masyarakat, strategi Turn Around menekankan pada pemanfaatan peluang yang tersedia untuk mengatasi kelemahan masyarakat dalam berperan aktif (Purwanti et al., 2022). Strategi ini meliputi dua langkah utama: (1) penguatan kapasitas masyarakat secara menyeluruh, dan (2) peningkatan kerja sama antar pihak, termasuk pemerintah, LSM, dan swasta. Pendekatan ini relevan dengan temuan di DAS Bone, di mana partisipasi masyarakat belum merata dan terkendala oleh keterbatasan informasi, insentif, dan akses terhadap pengambilan keputusan.

Strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

- Pendidikan dan Penyuluhan

Salah satu kunci utama untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah melalui pendidikan dan penyuluhan yang efektif. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan dampak dari tindakan masyarakat terhadap kesehatan DAS dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Mengadakan program pelatihan yang berfokus pada praktik terbaik dalam pengelolaan air juga dapat membekali masyarakat dengan keterampilan praktis untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengelolaan (Nanda et al., 2019).

- Pendekatan Kolaboratif

Menggunakan pendekatan kolaboratif, seperti yang dijelaskan dalam model CEPA (Collaborative, Ecology, Planning, Administrative), dapat mendorong keterlibatan masyarakat. Dalam hal ini, kerjasama antar berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal, pemerintahan, dan lembaga non-pemerintah, sangat penting untuk menciptakan solusi yang responsif terhadap kebutuhan lokal (Darmin, 2023). Proses kolaboratif ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkenaan dengan DAS mereka.

- Peraturan dan Kebijakan yang Mendukung Partisipasi

Pemerintah perlu mengadopsi kebijakan dan peraturan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat. Ini termasuk menerapkan regulasi yang mewajibkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi program pengelolaan DAS (Harmiati et al., 2018). Dengan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam mekanisme pengambilan keputusan, kepercayaan dan keterlibatan mereka akan meningkat.

- Insentif bagi Partisipasi Aktif

Pemberian insentif dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Insentif dapat berupa dukungan teknis, bantuan finansial untuk proyek komunitas, atau akses ke pelatihan dan sumber daya yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan DAS (Suparsa et al., 2022). Dengan memberikan manfaat nyata bagi komunitas yang berpartisipasi, akan ada motivasi yang lebih besar untuk terlibat.

- Teknologi dan Akses Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi tentang pengelolaan DAS sangat penting. Sistem informasi yang transparan dapat membantu masyarakat memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh DAS, serta peluang yang ada untuk terlibat (Mardinata et al., 2023; Rumihin, 2024). Penggunaan platform digital untuk komunikasi dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

- Monitoring dan Evaluasi yang Melibatkan Masyarakat

Membangun sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat dalam menilai efektivitas program pengelolaan DAS juga sangat penting. Melalui partisipasi dalam proses ini, masyarakat dapat memberikan masukan yang berharga, serta mengidentifikasi masalah dan solusi potensial yang mungkin tidak terlihat oleh pihak lain (Susilowati & Windiani, 2018). Keterlibatan ini juga akan meningkatkan rasa kepemilikan mereka terhadap program yang dijalankan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bone Bolango sudah mulai terbangun namun masih terbatas dan belum merata di seluruh tahapan pengelolaan. Mayoritas masyarakat belum sepenuhnya mengetahui program pengelolaan DAS, terutama dalam proses perencanaan yang kurang melibatkan masyarakat secara inklusif. Partisipasi masyarakat lebih banyak terjadi dalam pelaksanaan kegiatan seperti penanaman pohon dan pengelolaan sampah, meskipun insentif yang diberikan masih dirasakan kurang memadai terutama untuk pemeliharaan jangka panjang. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi juga masih kurang transparan dan belum melibatkan secara luas. Dari segi ekonomi, program rehabilitasi yang menanam tanaman produktif memberikan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat,

namun kemitraan antara masyarakat dengan berbagai pihak terkait masih perlu ditingkatkan. Partisipasi dalam edukasi dan sosialisasi masih rendah, meski program edukasi yang ada dianggap efektif oleh sebagian masyarakat. Forum DAS Bone merupakan wadah yang potensial untuk memperkuat kolaborasi dan partisipasi, namun penggunaannya belum optimal. Faktor utama yang menghambat partisipasi adalah keterbatasan informasi, insentif, dan edukasi, serta minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, peningkatan transparansi, pemberdayaan masyarakat secara sistematis dan inklusif sangat diperlukan agar pengelolaan DAS Bone dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan seluruh pihak yang telah memberikan masukan serta bantuan dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR REFERENSI

- Andriani, N. M. A., Rares, J. J., & Tampi, G. B. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tumokang Baru Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(046).
- Aprianty, H., Supriyono, S., Triyanto, D., & Aleksander, A. (2018). Implementasi good enviromental governance dalam pengelolaan daerah aliran sungai (das) bengkulu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(2), 136-148. <https://doi.org/10.24905/jip.3.2.2018.136-148>
- Ariyani, N., Ariyanti, D. O., & Ramadhan, M. (2020). Pengaturan ideal tentang pengelolaan daerah aliran sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 592-614.
- Darmin, D. (2023). Pendekatan cepa (collaborative, ecology, planning, administrative) dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pantai. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulsel*, 4(2), 134-153. <https://doi.org/10.58643/sipatokkong.v4i2.229>
- Ismah Pudji Rahayu Ishak, Andi Idham Asman, Despry Nur Annisa Ahmad, (2016). Pemanfaatan Teknologi Spasial Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Binanga Lumbua Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan, *Jurnal Geomatika*, 22 (1)
- Ismail, A., Affriani, A., Himayah, S., Nandi, N., & Malik, Y. (2019). Participatory mapping for community-based watershed management, lesson learn from central java and west nusa tenggara. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 286(1), 012024. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/286/1/012024>
- Laily, E. I. A. N., & Imro'atin, E. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 186-190.

- Mardinata, E., Cahyono, T., & Rizqi, R. (2023). Transformasi digital desa melalui sistem informasi desa (sid): meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Parta Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73-81. <https://doi.org/10.38043/parta.v4i1.4402>
- Nanda, L., Tan, F., & Noer, M. (2019). Tingkat partisipasi masyarakat dalam program penyelamatan dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan danau maninjau. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(2). <https://doi.org/10.15578/jksekp.v8i2.7432>
- Narendra, B., Siregar, C., Dharmawan, I., Sukmana, A., Pratiwi, P., Pramono, I., ... & Yuwati, T. (2021). A review on sustainability of watershed management in indonesia. *Sustainability*, 13(19), 11125. <https://doi.org/10.3390/su131911125>
- Pambudi, A. (2019). Watershed management in indonesia: a regulation, institution, and policy review. *Jurnal Perencanaan Pembangunan the Indonesian Journal of Development Planning*, 3(2). <https://doi.org/10.36574/jpp.v3i2.74>
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025*. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
- Purwanti, N., Rahim, S., & Hamidun, M. S. (2022). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Belantara*, 5(1), 72-80.
- Salampessy, M., Nugroho, B., & Purnomo, H. (2012). Hubungan karakteristik responden dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan lindung gunung nona di kota ambon propinsi maluku. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 9(3), 149-159. <https://doi.org/10.20886/jpsek.2012.9.3.149-159>
- Sinery, A. and Manusawai, J. (2017). Partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan hutan lindung wosi rendani (participation of communities in the wosi rendani protected forest management). *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 23(3), 394. <https://doi.org/10.22146/jml.18811>
- Sriyana, I. (2018). Indeks stakeholders pengelolaan daerah aliran sungai dengan pendekatan kiss di indonesia. *Media Komunikasi Teknik Sipil*, 24(1), 79. <https://doi.org/10.14710/mkts.v24i1.18966>
- Suparsa, I., Muliani, N., Puspawati, A., Wiryastuti, N., & Putri, I. (2022). Implementasi budaya lokal dalam penataan daerah aliran sungai untuk menunjang pengembangan kawasan ekowisata. *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, 5(1), 57-64. <https://doi.org/10.47532/jiv.v5i1.410>
- Susilowati, E. and Windiani, W. (2018). Pendekatan rekayasa sosial dalam pengelolaan sumberdaya air (studi kasus pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan semantok di kabupaten nganjuk-jawa timur). *Iptek Journal of Proceedings Series*, 0(5), 1. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2018i5.4415>
- Tanjung, N., Sadono, D., & Wibowo, C. (2017). Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan nagari di sumatera barat. *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 14.

<https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v13i1.12990>.

Wastiti, A., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2021). Faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(4), 130-143.